

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JAYAPURA**



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM KPKNL JAYAPURA	1
B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN KPKNL JAYAPURA.....	7
1. Aspek Strategis KPKNL Jayapura.....	7
a. Aspek secara internal	7
a. Aspek secara eksternal	11
2. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>) KPKNL Jayapura	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	17
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	19
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.....	21
4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	22
5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	24
B. REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN DIPA TAHUN 2020	27
BAB IV PENUTUP.....	29

KATA PENGANTAR

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura yang terdiri dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021, Pengukuran Kinerja tahun 2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022 dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan oleh KPKNL Jayapura dan sebagai perwujudan atas kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk menyusun rencana strategisnya masing-masing dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah agar tercapai penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 bahwa setiap instansi pemerintah harus membuat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pertanggung jawaban atas pelaporan keuangan pada KPKNL Jayapura disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP KPKNL Jayapura Tahun Anggaran 2021 disusun dalam rangka merealisasikan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian target yang dibebankan kepada KPKNL Jayapura selama tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jayapura dalam rangka menuju terwujudnya good governance, serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja KPKNL Jayapura dalam waktu yang akan datang. Disamping itu,

berfungsi pula sebagai input bagi kantor pusat dalam rangka melaksanakan penilaian produktivitas kantor-kantor vertikal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga memuat laporan pencapaian kinerja tahun 2020, serta menceritakan keberhasilan dan hambatan yang terjadi selama tahun 2021. Adapun keberhasilan dan hambatan yang terjadi selama tahun 2021 itu akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Tersusunnya LAKIP tahun 2021 KPKNL Jayapura tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama seluruh jajaran KPKNL Jayapura. Untuk itu kami ucapkan terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP KPKNL Jayapura ini sehingga dapat tersusun sedemikian rupa.

Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jayapura, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jayapura, 21 Januari 2022
Kepala KPKNL Jayapura

Widiyantoro

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Misi, terdiri dari:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Mengacu pada visi dan misi tersebut diatas, KPKNL Jayapura pada tahun 2021 memfokuskan kegiatan penyusunan LAKIP pada dua misi yaitu misi fiskal dan misi kelembagaan. Dalam menjalankan misi tersebut ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang selanjutnya ditentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, yaitu melalui penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut disusunlah tujuan yang hendak dicapai KPKNL Jayapura sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan Negara melalui pengurusan Piutang Negara dan Lelang.
2. Mengoptimalkan administrasi pengurusan Piutang Negara dan Lelang.
3. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan transparan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut KPKNL Jayapura telah melakukan beberapa kegiatan yang dapat diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU). Indeks Kinerja Utama KPKNL Jayapura terdiri dari 10 Sasaran Strategis dan 20 Indeks Kinerja Utama. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpegang teguh pada payung hukum sebagaimana peraturan yang berlaku.
2. Upaya peningkatan koordinasi dan sosialisasi terhadap stakeholder melalui media email, sms, call center, media website KPKNL Jayapura maupun DJKN.
3. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan stakeholder secara rutin untuk meningkatkan sinergi, persamaan persepsi terhadap permasalahan yang ada.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengusulan diklat, FGD, In house training dan rapat rutin.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara memperbaiki prosedur kerja, menata ruang kerja, sikap perilaku, integritas dan disiplin pegawai.
6. Efisiensi anggaran melalui sinergi pelaksanaan tugas antar seksi, arsip digital, dan menyusun skala prioritas pelaksanaan tugas.
7. Mengoptimalkan potensi pegawai yang ada dengan membentuk tim kreatif yang tergabung dari beberapa seksi untuk mencari inovasi-inovasi pelayanan.
8. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menggali potensi penilaian dan lelang
9. Perbaiki sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pokok dan fungsi
10. Menciptakan suasana kerja yang akrab, solid dan kondusif serta penuh kekeluargaan

Dari kegiatan diatas, KPKNL Jayapura mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,73%.

Namun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPKNL Jayapura menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Belum meluasnya informasi tentang lelang ke masyarakat dan masih rendahnya tingkat daya beli masyarakat terhadap obyek lelang khususnya di masa pandemi saat ini;
2. Kendala tanah adat dengan hak ulayat yang masih dominan di wilayah Papua;
3. Wilayah kerja yang sangat luas, sementara transportasi yang terbatas;
4. Lelang e-auction membutuhkan dukungan jaringan yang memadai sementara kondisi di Papua belum banyak didukung oleh jaringan yang memadai;
5. Minimnya jumlah Pengurusan Piutang Negara yang diserahkan kepada KPKNL Jayapura;
6. Seluruh BKPN yang di serahkan pengurusannya kepada KPKNL dengan tanpa adanya jaminan/agunan serta keberadaan debitur/penanggung hutang yang tidak jelas;
7. Penguasaan maupun pengelolaan asset idle belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh KPKNL Jayapura. Hal ini disebabkan oleh satker yang menguasai aset idle kurang berkenan jika aset tersebut diserahkan kepada KPKNL Jayapura.

Dengan tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja KPKNL Jayapura tahun 2021, diharapkan KPKNL Jayapura dapat sernakin terdorong dan termotivasi untuk rneningkatkan kinerjanya sejalan dengan visi dan rnisi yang hendak dicapai. Selain itu, juga diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, Pengukuran Kinerja Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahunan 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan LAKIP Tahun 2021 ini bertujuan agar KPKNL Jayapura dapat mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2021 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Berikut ini merupakan gambaran umum serta aspek strategis dan permasalahan KPKNL Jayapura.

A. GAMBARAN UMUM KPKNL JAYAPURA

KPKNL Jayapura adalah suatu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat dan

Maluku. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Jayapura terdiri dari 1 jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor), 5 eselon IV.a (Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum) dan kelompok jabatan fungsional yaitu :

- a) Subbagian Umum, mempunyai melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pehgadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
- b) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.
- c) Seksi Piutang Negara, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
- d) Seksi Hukum dan Informasi, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, peny1apan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

- e) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura saat ini dapat dilihat pada Bagan I.



KPKNL Jayapura mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dengan wilayah kerja seluas 392x Provinsi DK.I Jakarta yang terdiri 1 (satu) Kota dan 20 Kabupaten sebagai berikut:

1. Kota Jayapura
2. Kabupaten Jayapura
3. Kabupaten Keerom
4. Kabupaten Sarmi
5. Kabupaten Jayawijaya
6. Kabupaten Pegunungan Bintang
7. Kabupaten Yahukimo
8. Kabupaten Tolikara
9. Kabupaten Puncak Jaya
10. Kabupaten Merauke
11. Kabupaten Boven Digoel
12. Kabupaten Asmat
13. Kabupaten Mimika
14. Kabupaten Mappi
15. Kabupaten Mamberamo Raya
16. Kabupaten Mamberamo Tengah
17. Kabupaten Nduga
18. Kabupaten Yalimo
19. Kabupaten Puncak Jaya
20. Kabupaten Intan Jaya
21. Kabupaten Lanny Jaya

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Jayapura menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b) Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c) Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;

- d) Penyiapan barang pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f) Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- h) Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i) Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j) Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k) Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n) Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Jayapura sebagai instansi vertikal DJKN yang diberi mandat untuk mengelola barang telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merapikan manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara serta utilisasi aset negara yang optimal. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL Jayapura dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu:

- a. Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;
- b. Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan ekonomi dan keadilan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat strategi-strategi yang harus ditempuh, yaitu:

- 1) Membuat usulan atas peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- 2) Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, lelang dengan akurat dan akuntabel;
- 3) Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara;
- 6) Meningkatkan penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 7) Meningkatkan kesadaran (awareness) dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- 8) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- 9) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN KPKNL JAYAPURA

1. Aspek Strategis KPKNL Jayapura

Aspek Strategis KPKNL Jayapura terbagi dalam dua hal yaitu : Aspek secara internal dan eksternal yaitu :

a) Aspek secara internal yaitu:

1. Secara hukum KPKNL Jayapura memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Memiliki Sumber Daya manusia yang sesuai dibidangnya dan sarana prasarana yang cukup memadai. Adapun jumlah pegawai yang ada di lingkungan KPKNL Jayapura tahun 2021 berjumlah 20 pegawai dengan komposisi sebagaimana Tabel berikut :

1) Berdasarkan Golongan

Tabel I

Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total Pegawai
1.	I	-	-	-
2.	II	5 orang	-	5 orang
3.	III	11 orang	2 orang	13 orang
4.	IV	1 orang	1 orang	2 orang
TOTAL				20 orang

Berdasarkan hasil pemetaan dari golongan, KPKNL Jayapura mempunyai total pegawai sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Golongan III merupakan golongan terbanyak di KPKNL Jayapura yaitu 11 orang diikuti 7 orang golongan II dan 2 orang golongan IV.

1) Berdasarkan Pendidikan

Tabel II

Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total Orang
		I	II	III	IV	
1.	SLTA	-	-	1 orang	-	1 orang
2.	DI	-	2 orang	-	-	2 orang
3.	DIII	-	3 orang			3 orang
4.	S1	-	-	12 orang		12 orang
5.	S2	-		1 orang	1 orang	2 orang
TOTAL		-	5 orang	14 orang	1 orang	20 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, KPKNL Jayapura memiliki beragam tingkat pendidikan dari tingkat SLTA sampai ke tingkat pendidikan paling tinggi yaitu Strata 2. Dari segi tingkat pendidikan KPKNL Jayapura mempunyai 2 (dua) orang yang berasal dari Strata 2, 12 (dua belas) orang yang

berasal dari Strata 1, kemudian 3 (tiga) orang dari Diploma III, 2 (dua) orang dari Diploma I, dan 1 (satu) orang dari SLTA. Beragamnya jenis tingkat pendidikan di KPKNL Jayapura tidak menutup kemungkinan setiap pegawai untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh pegawai satu dengan pegawai lainnya.

2) Berdasarkan Umur dan Golongan

Tabel III

Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura Berdasarkan Umur dan Golongan

Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	-	5	6	-	11
31-40	-	-	4	-	7
41-50	-	-	2	1	5
>50	-	-	1	1	1
Total	-	5	13	2	20

3) Berdasarkan Jabatan Tenaga Fungsional

Tabel III

Jumlah Jabatan Tenaga Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1.	Juru Sita	3
2.	Pemeriksa	-
3.	Pejabat Lelang	2

4.	Penilai Kekayaan Negara	2
TOTAL		7

KPKNL Jayapura mempunyai 7 orang yang memegang jabatan fungsional, adapun jabatan fungsional itu antara lain: Juru Sita 3 (tiga) orang, Pejabat Lelang 2 (dua) orang, Penilai Kekayaan Negara sebanyak 2 (dua) orang.

Adapun dalam kegiatan operasionalnya KPKNL Jayapura beralamat di Gedung Keuangan Negara Lantai 4, Jalan Ahmad Yani No. 8, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura guna kelancaran tugas KPKNL Jayapura juga ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Kendaraan operasional sebanyak 10 unit yang terdiri dari 4 unit mobil dan 6 unit sepeda motor.
- Personal Komputer sebanyak 11 unit dan laptop sebanyak 21 unit.
- Ruang kerja dan rapat yang ber-AC.
- Serta sarana penunjang lainnya.

3. KPKNL Jayapura mempunyai peran strategis untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, KPKNL Jayapura telah melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan yang optimal dan professional yaitu melalui upaya yang telah dilakukan dengan membangun citra organisasi yang baik, seperti peningkatan disiplin pegawai melalui absensi *finger print* dan aplikasi Dianas serta Nadine. Penataan ruang pelayanan, penambahan ruang untuk pertemuan dan pembinaan, sarana kerja yang mendukung kelancaran kerja, peningkatan kenyamanan ruang kerja, dan penataan atau penertiban kembali administrasi laporan untuk masing-masing seksi. KPKNL Jayapura dengan didukung oleh sumber daya yang ada senantiasa berusaha untuk memanfaatkan peluang dalam wilayah kerjanya untuk meningkatkan pelayanan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Adapun peluang-peluang tersebut dapat berupa dari penggalan potensi lelang, pengurusan piutang negara, dan pengelolaan

kekayaan negara. Dari segi lelang terlihat adanya peluang untuk lelang barang sitaan, temuan, rampasan dan penghapusan yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan dari pengurusan piutang negara potensi penerimaan negara berasal dari penyelesaian piutang yang masih didukung oleh barang jaminan.

b) Aspek Strategis Secara Eksternal yaitu:

1. Aspek Geografi yaitu wilayah kerja KPKNL Jayapura yang sangat luas 392x wilayah Propinsi DKI Jakarta, dengan 523 satker tersebar meliputi 1 kota dan 20 Kabupaten di wilayah Papua.
2. Wilayah kerja yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, baik itu dari hasil hutan, tambang, perkebunan maupun pertanian.

2. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*) KPKNL Jayapura

Dalam mewujudkan tujuan-tujuannya KPKNL Jayapura mempunyai Visi yang sejalan dengan Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu: " Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ", merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Jayapura menetapkan Misi, yang terdiri dari:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel;

6. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi serta digunakan sebagai pedoman dan landasan kerja. Jadi dapat kita ketahui bahwa tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu.

Adapun untuk mendukung visi dan misi tersebut, KPKNL Jayapura mempunyai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Penerimaan Negara Melalui Pengurusan Piutang Negara dan Lelang Serta Mengoptimalkan Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang (PPNL).
2. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.
3. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara.
4. Peningkatan pelayanan penilaian.
5. Peningkatan pelayanan lelang.

Tujuan tersebut mesti dapat dicapai sesuai yang diharapkan pada setiap tahun anggaran.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh KPKNL Jayapura dalam rumusan yang lebih spesifik terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (satu tahun). Sasaran KPKNL Jayapura tersebut meliputi **Tercapainya Target Penerimaan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Terwujudnya penggunaan Layanan Yang Tinggi dan Terwujudnya Pengurusan Kekayaan Negara Yang Optimal**. Maka dari itu antara tujuan dan sasaran harus sejalan agar misi yang telah kita tetapkan dapat berhasil dan berjalan dengan baik sesuai harapan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan utama yang merupakan tantangan yang harus dihadapi yaitu :

1. Tidak sebandingnya beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL Jayapura dengan jumlah SDM yang ada. Hal ini dapat kita lihat pada tabel I, II dan III dapat kita simpulkan bahwa jumlah pegawai yang ada, tidak sebanding dengan luas wilayah kerja yang ada, yang mana hampir meliputi seluruh

kabupaten dan kota di Provinsi Papua yang luasnya 392x Provinsi DKI Jakarta. KPKNL Jayapura yang hanya didukung sumber daya manusia sebanyak 20 pegawai dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari SLTA hingga Strata 2. Kondisi ini masih tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL Jayapura.

2. Kondisi geografis yang meliputi cakupan wilayah kerja yang sangat luas juga merupakan tantangan tersendiri terutama mencakup mobilisasi semua harus menggunakan pesawat dengan biaya yang mahal.
3. Daya beli masyarakat terhadap minat lelang masih rendah.
4. Permasalahan tanah hak ulayat yang masih dominan di wilayah Papua.
5. Sarana jaringan telekomunikasi yang belum memadai.
6. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan sudah tidak optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

KPKNL Jayapura dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2021 telah melakukan penyusunan program. Adapun program tahun 2022 KPKNL Jayapura yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan pelayanan pengurusan piutang negara;
2. Peningkatan pelayanan pengelolaan kekayaan negara;
3. Peningkatan pelayanan lelang
4. Peningkatan pelayanan penilaian
5. Optimalisasi upaya penanganan perkara;
6. Peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian;
7. Peningkatan pelayanan di bidang keuangan;
8. Peningkatan pelayanan di bidang rumah tangga.

Selain yang ditulis diatas program yang akan diteruskan dari tahun sebelumnya oleh KPKNL Jayapura antara lain adalah:

1. Peningkatan efektifitas pengelolaan kekayaan negara. Peningkatan kekayaan negara adalah suatu peran strategis dan menjadi salah satu indikator penting dalam pengendalian anggaran negara dan sebagai upaya perwujudan akuntabilitas tata kelola keuangan negara.
2. Peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan bahwa keuangan negara salah satunya adalah piutang. Oleh karena itu dalam meningkatkan penerimaan negara, KPKNL Jayapura juga memfokuskan terhadap piutang negara. Adapun kegiatan pengurusan piutang itu meliputi : penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), Penarikan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), dan Biaya Administrasi (BIAD) Pengurusan Piutang Negara. Selain dari Piutang Negara, KPKNL Jayapura juga fokus terhadap lelang, dimana lelang merupakan penjualan barang

yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga yang diberikan sesuai dengan jenis dan bentuk barang yang akan dilelang.

Untuk mencapai semua tujuan dari program tersebut, maka KPKNL Jayapura pada tahun 2021 mengagendakan beberapa kegiatan-kegiatan beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung capaian target yang telah ditentukan.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, KPKNL Jayapura menetapkan Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur atas sasaran-sasaran yang akan dicapai. Pada tahun 2021 KPKNL Jayapura menetapkan 10 SS dengan 20 IKU yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun rincian SS dan IKU KPKNL Jayapura akan diuraikan pada tabel dibawah ini, yang mana meliputi target 2021 :

Tabel IV

Penetapan Kinerja KPKNL Jayapura Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kekayaan negara yang optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK • Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang • Tingkat penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2016) 	62% 100% 100%
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang • Persentase Realisasi Pokok Lelang 	89 (Skala 100) 100%
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL 	4,40

4.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikasi 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian 	22%
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase efektivitas penyelesaian BKPN 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Produktivitas Lelang 	35%
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction 	92%
		<ul style="list-style-type: none"> • Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN 	12,50%
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi yang Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 	89
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara 	85%
8.	<ul style="list-style-type: none"> • SDM yang Kompeten 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengembangan kompetensi pegawai 	100%
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi yang Fit For Purpose 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK 	75
		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja 	75
		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator 	80
10	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Keuangan yang Optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 	95,50%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai target dan realisasi kinerja KPKNL Jayapura pada tahun 2021. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada KPKNL Jayapura pada tahun 2021 dapat kita lihat pada tabel IV, selanjutnya pada tabel ini V menampilkan perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2021 dengan target pada tahun 2021, pada tabel VI menampilkan perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir dan pada uraian akhir akan dijelaskan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara Target dan realisasi kinerja tahun 2020.

Mengacu kepada *Strategy Map* Kemenkeu *Three* KPKNL tahun 2021 yang mana dituangkan dalam sebuah perjanjian kontrak kinerja antara Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku dengan KPKNL. Dari hasil perjanjian kontrak kinerja tersebut, didapat 10 butir Sasaran Strategis (SS) dan 20 butir Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk lebih jelasnya, berikut kami tampilkan tabel capaian IKU Kemenkeu *Three* pada KPKNL Jayapura tahun 2021 yang disertai dengan target tahun 2021 dan realisasi yang dicapai pada tahun tersebut.

Tabel V
Realisasi Tahun 2021 dan Target 2021

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	69,55%
2.	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	151,43%
3.	Tingkat penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2016)	100%	100,68%
4.	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	89 (Skala 100)	99,92
5.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	168,02%
6.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,40	4,90
7.	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100%	102,86%
8.	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	122,22%
9.	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	0%
10.	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	153,85%
11.	Persentase produktivitas lelang	35%	43,16%
12.	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92%	100,00%
13.	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,50%	0,40%
14.	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89	92,22
15.	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	88,52%
16.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%
17.	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75	96,77

18.	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75	92,93
19.	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	99,15
20.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50	95,90

Pada Tabel V diatas menjelaskan tentang jumlah target yang ditetapkan pada tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2021. Perbandingan ini dilakukan agar kita mengetahui realisasi IKU pada tahun 2021 yang diperoleh, dan nilai yang direalisasikan pada tahun 2021 tersebut dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menetapkan target yang harus dicapai pada tahun 2022. Tingginya suatu target yang ditetapkan dalam capaian kinerja berbanding lurus dengan nilai atau angka yang kita peroleh pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021, seluruh IKU berhasil dicapai sesuai target secara maksimal dan bahkan ada yang melebihi target, apabila kita melihat secara keseluruhan, hasil capaian kinerja KPKNL pada tahun ini sudah cukup optimal.

2. Membandingkan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel VI

Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2020, dan tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1.	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	69,55%	101,11%	-
2.	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	151,43%	103,27%	-

3.	Tingkat penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2016)	101%	56,12%	-
4.	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	99,98	98,99	100
5.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	168,02%	84,71%	102,80%
6.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,90	4,63	4,80
7.	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	102,86%	103,06%	165%
8.	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	122,22%	116,67%	-
9.	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	0,00%	0,90%	-
10.	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	153,85%	115,00%	-
11.	Persentase produktivitas lelang	43,16%	36,95%	37,37%
12.	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	100,00%	100,00%	100,22%
13.	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	0,40%	-	-
14.	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92,22	92,30	89,50

15.	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	88,52%	-	-
16.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120,00%	120,00%	100%
17.	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	96,77	-	-
18.	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	92,93	-	-
19.	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	99,15	-	-
20.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,90%	100,00%	96,72%

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah disepakati dengan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, yang mana dituangkan dalam Perjanjian Kontrak Kinerja, maka dihasilkan *Strategy Map* Kemenkeu-*Three* KPKNL. Dari hasil Kemenkeu *Three* ini, KPKNL Jayapura melaksanakan tugasnya sesuai kontrak kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai, perlu dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran Kinerja Kegiatan memuat program yang dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan dimana setiap kegiatan memuat uraian kegiatan, indikator kegiatan, satuan dari target kegiatan, realisasi capaian dan persentase pencapaian target.

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan perwujudan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi yang bersangkutan. Sesuai hasil pengamatan tingkat pencapaian hasil (*outcome*) kegiatan tahun 2021 dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh kegiatan pencapaiannya telah maksimal.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel VII

Komposisi Jumlah SDM KPKNL Jayapura Per-Seksi

No.	Uraian	Pejabat	Pelaksana	Honorer	Jumlah
1.	Kepala Kantor	1 orang	-	-	1 orang
2.	Sub Bagian Umum	1 orang	3 orang	6 orang	10 orang
3.	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	(1 orang)	3 orang	-	4 orang
4.	Seksi Piutang Negara	(1 orang)	2 orang	-	3 orang (1 pejabat merangkap sebagai plt. Kasi PN)
5.	Seksi Hukum & Informasi	1 orang	3 orang	-	4 orang
6.	Seksi Kepatuhan Internal	(1 orang)	1 orang	-	2 orang
7.	Jabatan Fungsional Pelelang	2 orang	-	-	2 orang (1 pejabat merangkap sebagai Plt. Kasi Hukum dan Informasi)
8.	Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	2 orang	-	-	2 orang (1 pejabat merangkap sebagai Plt. Kasi PKN)
.	Jumlah	10 orang	10 orang	6 orang	26 orang

Tabel VIII

Jumlah Pejabat Fungsional pada KPKNL Jayapura Per-Seksi

No.	Uraian	Penilai	Pejabat Lelang	Pemeriksa	Juru Sita	Jumlah Riil
1.	Kepala Kantor	-	-	-	-	-
2.	Sub Bagian Umum	-	-	-	-	-
3.	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	-	-	-	2	2 orang
4.	Seksi Piutang Negara	-	-	-	1	1 orang
5.	Jabatan Fungsional Pelelang	-	2	-	-	2 orang
6.	Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	2	-	-	-	2 orang
7.	Seksi Hukum & Informasi	-	-	-	-	-
8.	Seksi Kepatuhan Internal	-	-	-	-	-
9.	Jumlah	2	2	-	3	7 orang

Berdasarkan tabel VII dan VIII diatas dan dapat kita lihat juga pada Bab I. Tabel I. Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura Berdasarkan Golongan, Tabel II. Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura Berdasarkan Pendidikan, Tabel III. Jumlah Jabatan Tenaga Fungsional bahwa dalam rangka

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPKNL Jayapura telah dilakukan secara efisien dan optimal dengan jumlah sumber daya yang ada.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel IX

Analisis program /kegiatan yang menunjang
Pencapaian pernyataan kinerja

No.	Uraian Program	Input Kegiatan	Proses	Output Kegiatan	Outcome Kegiatan
1.	Percepatan pelayanan pengurusan piutang negara;	Penerimaan Penyerahan Piutang Negara	Resume BKPN	Penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara(SP3N), Penarikan Berkas Kasus Piutang Negara(BKPN), dan Biaya Administrasi (BIAD) Pengurusan Piutang Negara.	Tercapainya penurunan <i>outstanding</i> BKPN
2.	Peningkatan pelayanan pengelolaan kekayaan negara;	Penerbitan PSP, SK Penghapusan dan	Setelah berkas dinyatakan lengkap	Terbit SK	Peningkatan Aspek Pengelolaan Kekayaan

		Persetujuan Sewa			Negara pada satker K/L
3.	Peningkatan pelayanan lelang	Permohonan lelang, Permintaan Kutipan RL, Permintaan SKPT	Penetapan Lelang, Pembuatan Risalah Lelang, Kutipan dan Salinan Lelang	Pelaksanaan Lelang, Risalah Lelang, Kutipan dan Salinan Lelang	Peningkatan target lelang, frekuensi lelang dan bea lelang
4.	Peningkatan pelayanan penilaian	Permohonan penilaian BMN satker K/L	berkas dinyatakan lengkap	Laporan penilaian, laporan Hasil Kaji Ulang penilaian, DKPB	LKPP WTP
5.	Optimalisasi upaya penanganan perkara;	Permohonan penerbitan SKU, menghadiri sidang mediasi, replik, duplik, memori banding dan kasasi	Gugatan lengkap, sidang	Putusan Pengadilan	Adanya Kepastian Hukum
6.	Peningkatan pelayanan di bidang	Usulan Kenaikan pangkat, mutasi pegawai	Surat Pengajuan Usulan ke	SK Kenaikan pangkat	Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai

	kepegawaian;		Kantor Pusat		
7.	Peningkatan pelayanan di bidang keuangan	Usulan Kenaikan gaji berkala dan pembayaran gaji/honorarium pegawai	Pembuatan Daftar gaji dan usulan pembayaran honor	Penerimaan gaji oleh pegawai	Kesejahteraan pegawai
8.	Peningkatan pelayanan di bidang rumah tangga	Penyediaan sarana dan prasarana kantor	belanja	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan	Kenyamanan pegawai dalam bekerja
9.	Peningkatan efektifitas pengelolaan kekayaan negara	Edukasi kepada satker K/L	Melalui surat, kunjungan dan sosialisasi	Surat dan Notulen	Peningkatan sisi pengelolaan BMN satker
10.	Peningkatan penerimaan dan pengamanaan keuangan negara	Edukasi kepada stakeholder melalui Sosialisasi, koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada	Lelang HT, Lelang BMN, Lelang Sukarela	Terdapat 329 frekuensi lelang dan penerimaan pokok lelang sebesar Rp 287,316 M	Apresiasi masyarakat terhadap lelang dan Penerimaan PNBPN meningkat.

stakeholder
Perbankan
maupun K/L

B. Realisasi Penggunaan Anggaran DIPA tahun 2021

Realisasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam bentuk DIPA pada tahun 2021, merupakan pengukuran yang dilakukan atas seberapa besarnya proses penyerapan anggaran yang terjadi pada KPKNL Jayapura selama tahun anggaran. Sedikitnya penyerapan anggaran terjadi pada tahun tersebut, akan berdampak pada pemberian anggaran untuk tahun berikutnya. Adapun tabel penggunaan anggaran DIPA tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel X

Penggunaan Anggaran DIPA tahun 2021

No	Uraian	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0%
2	Belanja Barang	1.550.648.000	1.469.129.246	94,74%
3	Belanja Modal	365.000.000	365.000.000	100%
	Jumlah	1.915.648.000	1.834.129.246	95,74%

Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa terdapat penyerapan hampir maksimal dari keseluruhan pengeluaran belanja, baik belanja pegawai, belanja modal, maupun belanja modal pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya maka kami mencoba menguraikan sebagai berikut:

Realisasi anggaran belanja selama tahun 2021 sebesar 95,74% atau Rp1.834.129.246,- dari total anggaran belanja sebesar Rp1.915.648.000,-. Secara capaian pada tahun 2021 penyerapan anggaran pada tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu penyerapan anggaran tahun 2020 adalah sebesar 90,00%.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Jayapura sebagai salah satu unit penyelenggara Pemerintahan.

Dengan disusunnya LAKIP dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja dapat digambarkan hasil yang telah dicapai untuk setiap sasaran sebagai berikut :

1. Persentase pencapaian target pokok lelang sebesar 168,02%.
2. Persentase pencapaian target bea lelang sebesar 151,43 % adalah pencapaian yang melebihi target dan di tahun mendatang harus dipertahankan.
3. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN sebesar 153,85% dari target 100% yang ditetapkan dan di tahun mendatang harus dipertahankan
4. Penyerapan anggaran belanja cukup baik dan sampai tanggal 31 Desember 2021 untuk belanja barang 94,74%, dan belanja modal 100,00%.
5. Pengelolaan anggaran DIPA yang telah ditetapkan sebesar Rp1.915.648.000,- terealisasi sebesar Rp1.834.129.246,- atau sebesar 95,74%.
6. Persentase capaian target produktivitas lelang sebesar 43,16% adalah pencapaian yang melebihi target dan di tahun mendatang harus dipertahankan.
7. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan sebesar 102,86% adalah pencapaian yang optimal dan perlu dipertahankan untuk tahun berikutnya.

Dari data hasil capaian diatas, terdapat beberapa target yang sudah optimal dicapai pada tahun 2021 ini, namun masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor, yaitu:

1. Belum meluasnya informasi tentang lelang ke masyarakat;

2. Kemampuan satker dalam melakukan penatausahaan BMN masih kurang;
3. Kurang pahamnya beberapa satker tentang pengoperasian aplikasi SIMAK BMN;
4. Wilayah kerja yang luas, sementara transportasi minim;
5. Keterbatasan kemampuan pegawai dalam beracara di pengadilan.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk tahun 2021 nantinya, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah-masalah tahun ini tidak terulang lagi ditahun depan, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi kepada seluruh pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan utang piutang;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian pengurusan piutang negara, dan lelang;
3. Melakukan penggalan potensi lelang;
4. KPKNL akan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Kantor Wilayah masing-masing satker;
5. Mengikutkan pegawai untuk diklat yang mendukung kinerja kantor;
6. Peningkatan pelatihan penilaian secara berkesinambungan baik bagi pelaksana maupun pejabat.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kami mengharap agar berguna bagi para *stakeholder*, menjadi dasar acuan dalam rangka pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.